

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Film memiliki kemampuan besar dalam merepresentasikan permasalahan dan realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat (Sari, 2022). Sebut saja film *Laskar Pelangi* yang tayang pada tahun 2008, film ini lekat dalam penggambaran praktik pendidikan di tanah air. Penelitian oleh Martono (2010) menyebut beberapa kritik sosial yang diungkap oleh film tersebut yaitu ketidakmerataan akses pendidikan bagi masyarakat kelas bawah sehingga menyebabkan ketidaksetaraan sosial, formalitas pendidikan, dan otonomi pendidikan yang sepenuhnya belum otonom serta dikotomi antara sekolah favorit dan tidak favorit. Dengan demikian, film tersebut mengkonstruksi realita aspek pendidikan yang masih belum merata di Indonesia, utamanya pada daerah-daerah plosok atau pedalaman.

Berlanjut pada era 2010-an, perfilman Indonesia semakin berani dalam mengangkat isu-isu sosial di masyarakat. Tidak hanya berhenti pada permasalahan sosial pendidikan seperti pada film *Laskar Pelangi*, lebih dari itu para sineas di Indonesia mulai menjangkau pada masalah ketidaksetaraan gender yang acap kali merugikan perempuan. Contohnya film *Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak* yang dirilis pada tahun 2017. Film tersebut berfokus pada perjuangan perempuan dalam menolak budaya patriarki (Sumakud dan Septyana, 2020). Perjuangannya melawan budaya patriarki dibangun melalui serangkaian pembunuhan terhadap 7 orang laki-laki yang hendak merampok rumah dan merenggut kehormatannya. Sumakud dan Septyana (2020) mengungkap perlawanan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengkritisi fenomena *Yappa Marrada* yang masih sering terjadi di daerah Sumba, NTT, dimana laki-laki dapat langsung menculik dan melakukan tindakan sesuka hati mereka untuk mendapatkan perempuan idaman.

Tidak berhenti pada film *Marlina*, pada era 2020-an tepatnya di tahun 2021 penggiat film semakin tajam menyampaikan kritikan tentang masalah

seksualitas dan gender di masyarakat (Ramadhiansyah, 2024). Berdasarkan laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sebanyak 3.423 film diproduksi pada tahun 2020, ini tidak hanya soal kuantitas tetapi juga keragaman tema dan pendekatan yang diambil. Dirilisnya film seperti “Yuni” dan “Penyalin Cahaya” menunjukkan kepekaan industri film dalam menyikapi permasalahan gender dalam masyarakat.

Tidak berbeda jauh dengan film Marlina, dalam film Yuni lagi-lagi budaya patriarki menyudutkan kebebasan perempuan atas dirinya sendiri. Mirisnya, budaya masyarakat yang konservatif dengan balutan istilah *tabu* semakin mengikat perempuan untuk tidak beranjak dari ranah privat layaknya istilah sumur, dapur, dan kasur (Lenwinsky, dkk, 2024). Film tersebut mengonstruksi keterbatasan gerak seorang perempuan dalam mengejar impiannya yaitu berpendidikan tinggi karena budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat. Sosok Yuni dan beberapa teman perempuannya turut menjadi korban adanya pernikahan usia dini karena tekanan dari lingkungan sekitar. Bahkan, pada salah satu adegan merepresentasikan bagaimana guru bahasa Indonesia di sekolah Yuni yang sengaja memberi nilai jelek agar gadis itu tidak bisa mendapat beasiswa ke perguruan tinggi. Ternyata tidak sampai disitu, hal tersebut menjadi salah satu cara agar guru tersebut bisa melamar Yuni semata-mata untuk menutupi kelainan seksualnya sebagai lelaki tulen. Begitulah nasib perempuan akibat budaya patriarki dan relasi kuasa yang dikonstruksi dalam film Yuni (Idris, 2022).

Persoalan relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, dan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Foucault (dalam Wibowo dan Claretta, 2023) menyatakan bahwa relasi kuasa terjadi ketika pelaku merupakan pihak yang memiliki kuasa di dalam suatu hubungan. Sementara itu, ketimpangan relasi kuasa dapat terjadi ketika pelaku memiliki posisi dominan daripada korban. Misalnya kekerasan seksual dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, suami terhadap istri, senior terhadap junior, bahkan orang tua terhadap anak (Wibowo dan Claretta, 2023). Pernyataan tersebut dapat

menjelaskan bagaimana akhirnya ketidaksetaraan gender yang terus dilanggengkan akhirnya memunculkan relasi kuasa yang timpang dan berujung pada normalisasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Hasil dari proses tersebut akhirnya membuat perempuan cenderung sulit untuk terlepas dari stigma masyarakat serta sulit mendapat keadilan.

Penggambaran bagaimana sulitnya perempuan korban kekerasan seksual berjuang mendapatkan keadilan turut divisualisasikan dalam film *Penyalin Cahaya* yang tayang pada tahun 2021. Dalam film tersebut digambarkan bagaimana relasi kuasa pelaku akhirnya mematahkan keadilan yang seharusnya didapat oleh korban kekerasan seksual. Relasi kuasa dibangun melalui karakter Rama (pelaku) sebagai senior dari Suryani (korban). Kedudukan Rama yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi mampu mengontrol pihak kampus untuk melemahkan Suryani atas pembelaannya. Hingga pada akhirnya, Suryani dipaksa untuk klarifikasi atas tuduhannya kepada Rama sebagai pelaku kekerasan seksual (Wibowo dan Claretta, 2023). Dalam hal ini, relasi kuasa yang timpang tidak dihasilkan hanya dari individu yang bersangkutan saja, melainkan didukung oleh struktur sosial di dalamnya (Saputra, dkk, 2024). Bagaimana dekan fakultas akhirnya tunduk pada Rama merupakan bentuk akibat dari ketakutannya terhadap keluarga Rama yang dapat mengancam posisinya dalam institusi. Demikian, pembelaan terhadap pelaku kekerasan seksual seringkali terkait dengan tujuan kekuasaan yaitu upaya untuk memperkuat posisi sosial dalam hierarki institusi perguruan tinggi (Saputra, dkk, 2024).

Pemaparan di atas menunjukkan bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan masih sangat sering terjadi, utamanya akibat budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang. Oleh sebab itu, masalah kekerasan seksual menjadi layak untuk diperhatikan lebih lanjut (Eddyono, dkk, 2024). Studi di atas, merepresentasikan kekerasan seksual yang disebabkan oleh beberapa pihak, seperti guru, senior, dan institusi (dekan fakultas). Hal ini menunjukkan ironi pada peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh individu-individu terkait. Dalam konteks yang sama, ternyata saat ini masalah tersebut semakin banyak

terjadi di lembaga keagamaan seperti pesantren. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut terdapat 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2021. Dengan porsi terbanyak terjadi di lingkungan pendidikan berbasis asrama maupun pesantren yaitu berjumlah 12 satuan pendidikan atau 66,66 persen. Data tersebut menunjukkan adanya ketidakberesan sosial yang darurat untuk segera diluruskan. Dalam hal ini, film besutan Hanung Bramantyo berjudul *Tuhan Izinkan Aku Berdosa* berusaha mengonstruksikan masalah tersebut ke dalam bentuk audio-visual sebagai upaya kritik sosial. Syafrizal, et al (2023) menyebut bahwa kritik sosial akan lebih efektif jika penyampaianya dilakukan melalui media massa.

Gambar 1. 1 Hanung Bramantyo Memaparkan Motif Pembuatan Film TIAB



Sumber: YouTube Metro TV

Dalam sesi talkshow *Showbiz* yang tayang di kanal youtube Metro TV, Hanung memaparkan tentang motif pembuatan film religi terbarunya itu. Dalam kesempatan tersebut, Hanung mengungkapkan salah satu alasan terkuat dari pembuatan film *Tuhan Izinkan Aku Berdosa* adalah karena kemarahannya terhadap oknum-oknum yang berlindung di balik topeng agama untuk melakukan tindak kekerasan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa akhir-akhir ini kasus kekerasan terhadap perempuan semakin banyak terungkap. Mirisnya, kasus-kasus tersebut terjadi di tempat-tempat yang dianggap aman seperti sekolah, kampus, bahkan pesantren. Hanung merasa miris melihat bagaimana

korban yang lemah kebanyakan dibungkam melalui kekuasaan-kekuasaan pelaku. Melalui film tersebut, Hanung berharap dapat menjadi kontribusinya untuk mewakili suara para korban dan membuka mata para tokoh agama, politik, maupun masyarakat umum untuk lebih peka terhadap kondisi sosial. Tidak hanya menyoroti ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan terhadap perempuan, film ini juga menggambarkan kritik terhadap permasalahan sosial lainnya yang masih memprihatinkan hingga saat ini.

Telah dilakukan beberapa penelitian terhadap film tersebut, pertama oleh Natasya, dkk (2024) dengan judul "Analisis Pesan Dakwah dalam Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa" menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film Tuhan Izinkan Aku Berdosa tidak hanya menyampaikan pesan dakwah Aqidah, syariah, dan akhlak, tetapi juga menyampaikan makna yang bertolak belakang melalui simbol-simbol yang terdapat dalam beberapa adegan. Kedua, penelitian oleh Handita (2024) dengan judul "Analisis Framing Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa" menggunakan teori framing George Lakoff. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual dilakukan oleh oknum-oknum yang berindung di bawah naungan agama, kejahatan para politisi dari partai Islam, pejabat, hingga pemuka agama yang memanfaatkan kuasanya atas dasar agama itu sendiri. Mereka korupsi, membuat kebijakan-kebijakan yang menindas kaum lemah, bahkan memupuk kekayaan pribadi. Dari kedua penelitian tersebut, cenderung masih menganalisis pada aspek naratif, belum ada yang menganalisis dalam konteks yang lebih luas. Dengan begitu, penelitian ini menawarkan kebaharuan berupa objek penelitian, teori dan metode yang akan digunakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menjadi penting mengingat relevansi dengan kondisi sosial di Indonesia saat ini. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana kritik sosial terhadap permasalahan relasi kuasa yang menyebabkan kekerasan seksual dikonstruksikan dalam film Tuhan Izinkan Aku Berdosa.

1.2 Rumusan Masalah

Film merupakan salah satu instrument untuk menyampaikan kritik sosial. Film juga sebagai media untuk mengkonstruksi realita maupun bisa memperkuat realita yang ada di masyarakat. Permasalahan kekerasan seksual menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini, terutama pada film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan dalam studi ini adalah bagaimana konstruksi kritik sosial yang dikomunikasikan dalam film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konstruksi kritik sosial yang dikomunikasikan dalam film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kritik sosial dapat direpresentasikan melalui narasi, dialog, dan aspek sinematik dalam film. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dalam mengkaji media dan isu-isu sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk membantu pembaca atau masyarakat dalam memahami isu-isu sosial yang diangkat melalui sudut pandang sutradara dalam film Tuhan Izinkan Aku Berdosa sehingga tidak salah dalam menafsirkan pesan di dalamnya. Selain itu, juga memahami potensi film sebagai alat untuk membangun kesadaran, mengkritik norma, kebijakan, dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Manfaat praktis juga ditujukan untuk para sineas agar dapat memproduksi karya-karya yang mampu menyampaikan kritik sosial secara efektif dan berwawasan kritis.